

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sasaran penting dari Pembangunan Ekonomi adalah mencapai tujuan dari pembangunan ekonomi tersebut, antara lain yaitu terciptanya kondisi kemajuan ekonomi masyarakat yang dimanifestasikan dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Setiap Pembangunan Ekonomi harus selalu dimulai dari adanya langkah-langkah yang terinci dan operasional dari Perencanaan Pembangunan ekonomi dan dijadikan pedoman dan garis-garis besar dari haluan pembangunan tersebut. Perangkat Perencanaan Pembangunan ekonomi harus dilengkapi dengan informasi dan data yang memiliki tingkat akurasi yang terukur dan valid, sehingga didalam muatan perencanaan pembangunan ekonomi yang tersusun dapat mampu mengadopsi keadaan kedepan dari ketidak pastian dan resiko yang besar.

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Artinya daerah diberikan kewenangan untuk menentukan arah dan kebijaksanaan pembangunan dalam mengelola birokrasi wilayah pada tingkat daerah.

Tujuan pembangunan daerah adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan dalam pola perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan hasil-hasil yang telah dicapai. Kewenangan daerah dalam pembangunan tersebut sedapat mungkin memperhatikan aspek integritas pembangunan nasional yang terarah dan berkesinambungan (*sustainable development*), selain itu harus memperhatikan aspek sumber-sumber keuangan baik dari PAD maupun dari perimbangan keuangan pusat ataupun dari sumber lain yang syah.

Seiring dengan pelaksanaan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah daerah harus dapat menyesuaikan terutama dengan terjadinya perubahan paradigma dari sentralisasi ke desentralisasi yang substansinya adalah demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan jalannya pemerintahan.

Konsekuensi dari UU No 32 tahun 2004 adalah “Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain”. Hal ini berarti eksistensi dan prospek daerah kembali pada inisiatif, kreativitas dan inovasi daerah dalam menggalang dan mendayagunakan berbagai potensi aset dan akses ke arah yang lebih produktif dan ekonomis.

Otonomi daerah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah.

Kesiapan dan keseriusan dalam melaksanakan otonomi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan melaksanakan otonomi daerah. Ketersediaan dana

pembangunan menjadi permasalahan umum yang dihadapi dalam melaksanakan otonomi daerah. Sesuai dengan paradigma otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang yang luas dalam mengatur penggunaan dana pembangunan, termasuk didalamnya adalah menggali sumber-sumber penerimaan dana atau pendapatan daerah.

Sesuai dengan Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang sumber-sumber pendapatan daerah, pada dasarnya pendapatan daerah dikelompokkan menjadi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak, retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD.
2. Dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah akan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Hal ini berarti eksistensi dan prospek daerah kembali kepada inisiatif, kreativitas, dan inovasi daerah dalam menggalang dan mendayagunakan berbagai potensi di daerah ke arah yang lebih produktif dan ekonomis. Kesiapan dalam melaksanakan otonomi tidak terlepas dari kemampuan daerah untuk menggali sumber pendapatan asli daerah guna mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Ketersediaan dana pembangunan menjadi permasalahan umum dalam melaksanakan

otonomi daerah. Sesuai dengan paradigma otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang yang luas dalam mengatur penggunaan dana pembangunan, termasuk di dalamnya adalah menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kenyataannya besaran PAD masih relatif kecil jika dibanding dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan kondisi ini masih dialami sebagian besar daerah di Indonesia, sehingga sebagian besar daerah masih menggantungkan diri kepada kucuran dana dari pemerintah pusat dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Peningkatan PAD sudah diupayakan oleh setiap pemerintahan daerah, namun umumnya peningkatan ini masih belum memenuhi target yang diharapkan. Oleh karena itu untuk dapat mencapai tingkat kenaikan yang cukup berarti, maka perlu dilakukan perhitungan dan analisis yang rasional untuk meningkatkan PAD yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Berbagai alternatif upaya dapat dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, antara lain: (1) melakukan usaha intensifikasi melalui perbaikan sistem penyusunan target penerimaan agar sesuai dengan potensi yang ada, mengintensifkan pengelolaan sumber penerimaan daerah, mengefektifkan pelaksanaan pengawasan, dan melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi guna mengimbangi perkembangan inflasi di daerah, dan (2) melakukan identifikasi potensi penerimaan yang baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kabupaten Lampung Selatan merupakan bagian wilayah Propinsi Lampung memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, baik dari sektor pertanian, perikanan, dan kelautan, sektor pertambangan, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata.

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara $105^{\circ}14'$ sampai dengan $105^{\circ}45'$ Bujur Timur dan $5^{\circ}15'$ sampai dengan 6° Lintang Selatan. Berdasarkan posisi tersebut, Kabupaten Lampung Selatan termasuk daerah tropis. Kabupaten Lampung Selatan meliputi wilayah daratan kurang lebih $3.180,78 \text{ Km}^2$, dengan pusat pemerintahan di Kota Kalianda yang sekaligus merupakan Ibukota Kabupaten Lampung Selatan sejak tanggal 11 Februari 1982. Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 20 Kecamatan yang meliputi 362 desa definitif, 9 desa persiapan, dan 3 kelurahan.

Batas administrasi Kabupaten Lampung Selatan adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan memiliki banyak pulau, diantaranya yaitu Pulau Krakatau, Sebesi, Sebuku, Legundi, Puhawang, Sertung, Rakata, Mundu,

Seram, Rimau Balak, Panjurit, Siuncal, Mahitom, Tegal, Umang-umang, Condong, dan beberapa pulau kecil lainnya.

Di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terdapat beberapa sungai yang penting antara lain, Way Sekampung, Way Ketibung, dan Way Pisang. Pada umumnya sungai-sungai ini dimanfaatkan untuk mengairi (irigasi) sawah dengan pembuatan dam-dam. Sementara itu jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan antara lain *latosol*, *Podsolik*, *Andosol*, *Hidromorf*, *Alluvial* yang tersebar diseluruh wilayah.

Visi Kabupaten Lampung Selatan adalah terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah yang mandiri, menarik, berkeadilan, aman, tertib dan sejahtera.

Daerah mandiri dalam pengertian pemerintah daerah memiliki kemampuan yang terus meningkat untuk membiayai sendiri pembangunannya, masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan hidup minimum dan dunia usaha mampu mengembangkan dunia usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara adil dan bertumpu pada keswadayaan masyarakat dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa.

Daerah yang menarik dalam pengertian mampu memberikan kenyamanan, hiburan, dan peluang usaha sehingga menarik orang untuk berkunjung, berwisata dan menanamkan modal.

Daerah yang berkeadilan dalam pengertian masyarakatnya menjalankan agama secara baik dan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, tegaknya hak asasi manusia dan supremasi hukum, berkembangnya partisipasi masyarakat serta terdistribusinya pembangunan dan hasil-hasilnya.

Daerah yang aman dan tertib dalam pengertian terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tertib dengan semakin berkurangnya kriminalitas dan tindak kejahatan.

Daerah yang sejahtera dalam pengertian masyarakatnya hidup sehat, berpendidikan, berkembangnya budaya dan kebudayaan daerah, terjalinya komunikasi sosial yang harmonis, terlindungi dan diberdayakannya penyandang cacat dan fakir miskin, dan bebas dari rasa takut yang dilandasi nilai-nilai agama.

Dengan visi tersebut yang didukung dengan letak/posisi geografis yang strategis, yaitu berdekatan dengan ibu kota negara dan sebagai penyangga Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan akan mampu menggapai visi tersebut.

Dampak letak geografis ini akan memberikan *spread effect* ekonomis dan informatifa yang cukup tinggi.

Melihat potensi ini berbagai jenis layanan dapat disediakan untuk mendapatkan penghasilan bagi daerah. Jenis layanan yang patut disediakan ini sangat tergantung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan desain dengan harapan layanan tersebut tetap memenuhi syarat *cost recovery* namun tetap pula memenuhi syarat-syarat kepatutan, tidak membangun kembali *high cost economy*, selaras dengan rasa keadilan dipelihara sehingga memberi dampak menyenangkan (*feel benefit*).

Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Selatan memegang peranan penting dalam meningkatkan kemandirian fiscal, namun secara riil sampai saat ini Kontribusi PAD terhadap APBD di Kabupaten Lampung Selatan secara nominal masih relatif kecil walaupun persentasenya cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD lebih besar dibanding dengan kontribusi pajak daerah; dilain pihak tingkat pencapaian target penerimaan retribusi daerah relatif lebih rendah dibanding dengan tingkat pencapaian target penerimaan pajak daerah.

B. Permasalahan

Hasil kajian sementara terlihat bahwa peningkatan penerimaan daerah terutama dari retribusi belum optimal. Pada tahun 2012 PAD Lampung Selatan mencapai 98.54 persen dari target yang ditetapkan sebanyak Rp 16,17 Milyar. Sementara pencapaian retribusi utama mencapai 93,08 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 6,17 Milyar, dan pencapaian target pajak daerah mencapai 102,86 persen dari target yang

ditetapkan sebesar Rp 4,61 milyar. Karena penerimaan daerah ini merupakan hal penting dalam membangun kemandirian finansial, maka diperlukan upaya untuk menggali kemungkinan yang dapat ditindak lanjuti dengan tidak membebani ekonomi masyarakat. Hasil pengamatan diperkirakan ada beberapa sumber penerimaan daerah yang terkait dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan, yakni :

1. Retribusi Daerah

- a. Retribusi Jasa Usaha tempat pelelangan ikan,
- b. Retribusi Pelelangan Ikan
- c. Retribusi izin Usaha Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan, antara lain :
 - i. Retribusi Izin Usaha dan Pungutan hasil Usaha Pembenihan,
 - ii. Usaha Pengumpulan/Penampungan dan Perdagangan Ikan,
 - iii. Usaha Budidaya Air Tawar,
 - iv. Usaha Budidaya Air Payau dan Lain-lain.

2. Bagi Hasil bukan Pajak/Sumberdaya Alam Perikanan.

Berkenaan dengan hal ini maka dipandang perlu untuk melakukan Analisis Peningkatan PAD melalui Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan dikabupaten Lampung Selatan.

Dari potensi ekonomi dan kondisi geografis Kabupaten Lampung Selatan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas pemungutan retribusi dan pajak daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Bagaimanakah potensi penerimaan retribusi atau estimasi penerimaan retribusi daerah, khususnya estimasi untuk retribusi dilingkungan dinas Perikanan dan Kelautan .

C. Tujuan

Tujuan kegiatan yang ingin dicapai ialah :

1. Teridentifikasinya potensi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dilingkungan dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan
2. Mengetahui/mengukur kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan.
3. Menentukan besaran estimasi penerimaan Asli Daerah (PAD) dilingkungan dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan.

D. Kerangka Pemikiran

Perkembangan ekonomi dapat diartikan sebagai usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Selain itu tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan produktivitas. Menurut Irawan dan Suparmoko (Oktober 1999 ; 6), pembangunan

ekonomi atau perkembangan ekonomi adalah perubahan-perubahan dalam struktur output dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian. Manfaat dari perkembangan ekonomi yaitu ;

1. Output atau kekayaan masyarakat pada suatu wilayah akan bertambah.
2. Memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu.
3. Tersedianya barang-barang dan jasa yang dapat digunakan sebagai pemuas kebutuhan.
4. Mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara sedang berkembang dengan negara yang sudah berkembang, mengurangi kesenjangan atau perbedaan antara daerah kaya dengan daerah miskin.
5. Peningkatan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

Selain manfaat yang didapat dari perkembangan ekonomi seperti yang telah dijelaskan, terdapat kerugian-kerugian dari perkembangan ekonomi, antara lain :

1. Perkembangan teknologi yang digunakan oleh perusahaan tidak didukung dengan ketrampilan yang dimiliki tenaga kerja akan menyebabkan pengangguran.
2. Pada sistem perekonomian terbuka, kegiatan ekspor akan meningkatkan produksi dalam negeri untuk memperluas pasar barang buatan dalam negeri, begitu pula dengan kegiatan impor dapat memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi seperti penyediaan mesin-mesin atau teknologi dan bahan mentah yang

diperlukan dalam industri atau penyediaan barang konsumsi masyarakat. Namun kegiatan impor yang berlebih akan mengurangi kegiatan ekonomi dalam negeri.

Salah satu indikasi kemajuan perekonomian pada suatu daerah adalah melalui pencapaian tingkat pertumbuhan PDRB dalam kurun waktu tertentu. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang berada di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB terdiri dari 9 (sembilan) sektor antara lain ; sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor transportasi dan komunikasi, sektor keuangan, perbankan, dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.

Pada sektor pertanian yang terdiri dari subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan, dan subsektor perikanan dan kelautan.

Untuk sektor pertambangan dan penggalian yang terdiri dari subsektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan bukan migas, dan subsektor penggalian.

Sektor industri yang terdiri dari industri pengolahan mencakup pengolahan bahan organik maupun anorganik menjadi produk baru yang lebih tinggi mutunya, baik dilakukan dengan tangan, mesin, ataupun melalui proses kimiawi yang dilakukan oleh rumah tangga maupun industri pengolahan. Industri pengolahan

terdiri dari subsektor industri pengolahan minyak dan gas bumi (migas), dan subsektor industri pengolahan bukan migas.

Untuk sektor listrik, gas, dan air bersih yang mencakup subsektor listrik, subsektor gas dan subsektor air bersih.

Sektor konstruksi mencakup kegiatan pembangunan atau pembuatan, perluasan, pemasangan, perbaikan besar dan ringan, serta perombakan bangunan atau konstruksi lainnya. Komoditas hasil dari kegiatan ini adalah bangunan atau konstruksi, baik dalam bentuk bangunan tempat tinggal, jalan, jembatan, bendungan, jaringan listrik, telekomunikasi, dan konstruksi lainnya. Kegiatan sub konstruksi seperti pemasangan instalasi listrik, saluran telepon, alat pendingin, serta pembuatan dan perbaikan bangunan tempat tinggal yang dilakukan sendiri oleh rumah tangga, lembaga swasta, dan pemerintah, termasuk dalam kegiatan sektor konstruksi.

Untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran ; subsektor perdagangan merupakan kegiatan pembelian dan penjualan barang, baik barang baru maupun barang bekas guna disalurkan atau di distribusikan kepada konsumen tanpa mengubah wujud komoditas (barang dagangan) tersebut. Subsektor hotel mencakup kegiatan penyediaan fasilitas penginapan dan berbagai akomodasi lainnya termasuk penyediaan makanan dan minuman serta fasilitas lain yang masih dalam satu kesatuan dengan kegiatan penginapan. Sedangkan subsektor restoran mencakup usaha

penyediaan makanan dan minuman jadi, yang umumnya dikonsumsi di tempat penjualan.

Sektor transportasi dan komunikasi, subsektor transportasi meliputi kegiatan jasa angkutan penumpang maupun barang, dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor atas dasar pembayaran. Subsektor komunikasi meliputi kegiatan pengiriman melalui jasa pos, telekomunikasi, dan kegiatan jasa penunjang komunikasi.

Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan meliputi subsektor keuangan yang mencakup subsektor bank yang meliputi kegiatan jasa pelayanan keuangan kepada pihak lain seperti jasa simpanan dalam bentuk tabungan, giro, jasa kredit, jasa transfer, jual-beli surat berharga, serta penitipan barang berharga. Selain itu subsektor keuangan juga mencakup subsektor lembaga keuangan bukan bank seperti kegiatan asuransi dan koperasi simpan pinjam. Subsektor sewa bangunan meliputi kegiatan persewaan bangunan dan tanah, baik bangunan tempat tinggal maupun bukan, seperti perkantoran dan pertokoan, serta persewaan tanah persil. Sedangkan subsektor jasa perusahaan meliputi kegiatan jasa pelayanan konsultasi dibidang hukum, arsitek, iklan dan riset pemasaran serta kegiatan jasa persewaan mesin dan peralatan.

Sektor jasa-jasa, mencakup subsektor pemerintahan umum dan pertahanan meliputi kegiatan pelayanan jasa administrasi pemerintahan dan pertahanan, serta kegiatan

pelayanan jasa pemerintahan lainnya. Subsektor jasa sosial kemasyarakatan meliputi kegiatan jasa.

Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi maka dibutuhkan peran serta dari pemerintah. Peran pemerintah tersebut meliputi :

- (1) mendiversifikasikan kegiatan ekonomi,
- (2) mengembangkan infrastruktur,
- (3) meningkatkan tabungan dan investasi,
- (4) meningkatkan taraf pendidikan,
- (5) mengembangkan institusi yang menggalakkan pembangunan, dan
- (6) merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi.

Diversifikasi kegiatan ekonomi adalah kebijakan pemerintah untuk membangun perekonomian dengan cara mengembangkan kegiatan ekonomi di sektor baru yang lebih modern, seperti sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan. (Sukirno, 2004 ; 446). Untuk mewujudkan peran pemerintah tersebut, maka dibutuhkan kebijakan ekonomi salah satunya dengan menggunakan kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah dalam melakukan perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian, (Sukirno. 2004;24). Menurut Basri (2003; 23-24), kebijakan fiskal tercermin pada kebijakan keuangan daerah atau anggaran daerah. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah :

1. Untuk menjamin agar laju pertumbuhan ekonomi dapat sesuai dengan potensinya. Ini berarti dengan kebijaksanaan fiskal akan diusahakan seoptimal mungkin agar potensi-potensi ekonomi yang ada pada daerah dapat terealisasi.
2. Untuk mengusahakan terbukanya berbagai kesempatan.
3. Mengusahakan agar harga berada dalam tingkat yang wajar dan selalu dalam keadaan stabil, sehingga memungkinkan peningkatan pertumbuhan.

Umumnya daerah dengan intensitas ekonomi yang tinggi, akan memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan atau PDRB. Perkembangan perekonomian daerah dapat terjadi karena peningkatan produktivitas dan pendapatan pada kegiatan ekonomi yang sudah ada, tetapi dapat pula karena munculnya kegiatan usaha baru.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Peran pemerintah dan tanggung jawab sangat diperlukan, akan tetapi implikasi kebijakan fiskal berkaitan langsung terhadap perkembangan ekonomi yang pada awalnya lebih memperhatikan pada kuantitas pengeluaran pemerintah, selain efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah dan alokasi sektoral. Dalam meningkatkan perkembangan ekonomi peran pemerintah lebih efektif dilakukan oleh

pemerintah daerah. (Mangkusoebroto, 2000 ; 1). Selain itu pemerintah juga bertindak sebagai distributor dalam penyediaan faktor-faktor yang nantinya dijadikan sebagai sumber daya dalam pengembangan sektor ekonomi yang ada seperti penyediaan infrastruktur. Pengembangan sektor ekonomi itu sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, khususnya PAD. Untuk melihat hubungan antara perkembangan ekonomi daerah dengan PAD sebagai salah satu komponen yang sangat berperan dalam kemandirian pembiayaan pembangunan dapat menggunakan alat analisis korelasi dan konsep upaya fiskal (*tax effort*).

Korelasi merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui keterkaitan hubungan masing-masing variabel. Sedangkan, upaya fiskal merupakan derajat kepekaan antara PAD dengan kemampuan membayar pajak (PDRB), atau upaya fiskal dapat diartikan sebagai perbandingan antara besarnya PAD terhadap PDRB.

Semakin tinggi PDRB suatu daerah maka kemampuan dalam membayar pajak akan semakin tinggi. Besarnya upaya fiskal yang dihasilkan suatu daerah menunjukkan besarnya posisi fiskal daerah tersebut. Sehingga secara tidak langsung perkembangan ekonomi pada suatu daerah akan mendukung tingkat kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran penulisan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Selain menghasilkan penerimaan PAD, intensitas ekonomi yang tinggi akan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dan juga daerah sekitarnya, selain itu dampak yang dapat dirasakan adalah penggunaan faktor

produksi oleh perusahaan akan meningkat. Oleh karena itu peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi atau perkembangan ekonomi seyogyanya dapat menetapkan kebijakan yang tepat.